

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dilaksanakan di Provinsi Riau melalui pemberian modal usaha, keberadaan Solar packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), pendirian kedai pesisir dan Lembaga Keuangan Mikro telah mampu meningkatkan modal sosial masyarakat pesisir di daerah ini. Pemberian modal usaha dan kemudahan mengakses kebutuhan bahan bakar minyak, keberadaan kedai pesisir dan Lembaga Keuangan Mikro telah memotivasi dan meningkatkan semangat yang tinggi para nelayan, pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan secara bersama sama. Program PEMP tersebut memberikan penguatan jaringan keriasama, nelayan, saling percaya dalam bekerja, sikap saling bantu membantu, kebersamaan dalam kelompok dan kepatuhan terhadap norma norma yang ada dalam masyarakat Pesisir.
2. Modal sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis secara keseluruhan memiliki eksistensi yang baik berdasarkan penilaian pada persepsi masyarakat pesisir terhadap modal sosial itu sendiri. Jaringan merupakan pembentuk modal sosial yang dominan diikuti dengan kepercayaan, saling bantu membantu, partisipasi kelompok dan norma. Tingginya dimensi jaringan pemasaran antara nelayan, pengusaha, pedagang eceran dan pengasap ikan mempengaruhi kinerja kegiatan usaha kelompok. Jaringan semakin baik karena diperkuat saling kepercayaan diantara anggota, saling bantu membantu, partisipasi kelompok dan patuh terhadap aturan yang berlaku (norma). Keberadaan dimensi-dimensi modal sosial tersebut telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Implikasinya jika modal sosial semakin baik dan menguat maka hal itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Tingkat penghidupan yang telah dicapai oleh masyarakat pesisir selama ini secara umum dapat dikategorikan sudah sejahtera, hal ini ditandai dengan persepsi mereka terhadap kesejahteraan yang secara umum menyatakan baik. Pencapaian kesejahteraan tersebut terutama disebabkan oleh keberadaan modal sosial, sedangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara langsung belum berperan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran kedai pesisir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir, demikian pula peran Lembaga Keuangan Mikro masih perlu perbaikan dalam pengelolaannya.
4. Program PEMP yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis selama ini secara tidak langsung telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan modal sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Melalui modal sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir telah mampu menaikkan efek sejahtera yang diperoleh nelayan sehingga hal tersebut menjadi alasan utama mengapa program PEMP khususnya di wilayah pesisir Indragiri Hilir dan Bengkalis masih sangat urgen untuk dilaksanakan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian serta permasalahan pokok yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mengaktifkan dan meningkatkan program PEMP ini baik dari aspek kualitas maupun perluasan program melalui program bantuan lainnya. Pemberian modal usaha dan pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) untuk wilayah pesisir yang terisolir tetap diharapkan oleh masyarakat pesisir. Melalui peningkatan program tersebut akan semakin memberikan motivasi terhadap masyarakat pesisir, menumbuhkan semangat kerja dan membangkitkan potensi modal sosial yang tumbuh dan berakar dalam masyarakat pesisir.

2. Kepada masyarakat pesisir didaratan Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis untuk meniaga dan mempertahankan kelestarian budaya sebagai unsur kekuatan modal sosial yang menopang dan merespon program-program pembangunan seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan.
3. Diharapkan kontinuitas program, penambahan jumlah dana ekonomi produktif (DEP) dan bimbingan masyarakat, yaitu: (1) setiap wilayah pesisir hendaknya mendapatkan DEP setiap tahun atau minimal setiap dua tahun sekali dengan jumlah DEP yang lebih besar sehingga bisa menunjang usaha mereka, (2) Pendampingan tidak hanya pada saat sampai pada peguliran dana tetapi, tetapi diharapkan selama program berjalan. (3) Ada persyaratan khusus yaitu tingkat pendidikan. Keterampilan, kecakapan, atau memiliki pengetahuan, pengalaman yang berkaitan dengan pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan Kedai Pesisir, sehingga kelompok masyarakat pesisir didalam menentukan pengelola kedua unsur tersebut adalah dengan berdasarkan persyaratan yang ada, (4) bimbingan pelatihan sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kepada pengelola kedai pesisir dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar penanganannya bisa lebih professional. Profesionalisme pengelolaan kedua unsur program PEMP tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas kerja nelayan.
4. Kuatnya peran mediasi dari modal sosial pada pengaruh program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan maka Program PEMP tidak hanya diharapkan dari pemerintah, namun keterlibatan Lembaga Non Pemerintah dalam hal ini lembaga Swadaya masyarakat (LSM) diharapkan untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.